

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adam Chazwi. 2010. *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Teori-teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP – Indonesia. Yogyakarta.
- Amir Ilyas dan Yuyun Widaningsih. 2010. *Hukum Korporasi Rumah Sakit*. Yogyakarta.
- Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta
- . 2018. *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*. Rineka Cipta. Jakarta
- . 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Baharuddin Lopa. 2001. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Kompas. Jakarta.
- Diana Napitupulu. 2010. *KPK in Action*. Raih Asa Sukses. Jakarta
- Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Extrix Mangkeprijanto. 2019. *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Guepedia Publisher. Jakarta.
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta
- K. Wantjik. 2002. *Tindak Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Leden Marpaung. 2017. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Refika Aditama. Bandung
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. 2017. *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Qordhawi. 2017. *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*. Armico. Bandung.
- R. Wiyono. 2008. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta
- Said Sampara dan La Ode Husen. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Kretakupa Print Makassar. Makassar.
- Saleh dan Ruslan. 2018. *Pokok-Pokok Pikiran Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara. Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2005. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta.
- Sudaryono. Natangsa Subakti. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Muhammadiyah University Press. Surakarta
- Tri Andrisman. 2009. *Asas-asas dan Aturan umum Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Bandar Lampung. Lampung.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)* Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika. Jakarta.

## **Jurnal**

- Alexzander Rinaldy. 2020. "Kriminalisasi Match Fixing Dalam Pertandingan Sepakbola Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap". Jurnal Hukum.
- Eddy OS Hiariej dkk. 2009. "Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegak Hukum". Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

- Hidayat. 2017. "Pertanggungjawaban pidana Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Tindakan Pidana Korupsi". Jurnal EduTech Vol 3. No. 2.
- Rinaldy A, Tawang D. 2018. "Kriminalisasi Match Fixing Dalam Pertandingan Sepak Bola Di Indonesia". Jurnal Hukum Adigama. Vol. 1, No. 1
- Muhammad Fitrialdi. 2020. "Analisa Sanksi Pidana Terhadap Kasus Pengaturan Skor Liga Sepakbola Indonesia". Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.
- Muhammad Randi Aulia. 2019. "Kajian Yuridis Tindak Pidana Suap Tentang Penetapan Match Fixing Dalam Pertandingan Sepakbola Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap." Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Bandung.
- Muladi. "Tindak Pidana Suap sebagai Core Crime Mafia Peradilan dan Penanggulangannya, makalah dalam Seminar Nasional Suap, Mafia Peradilan, Penegakan Hukum dan Pembaharuan Hukum Pidana. Kerjasama FH UNDIP dengan KY di Semarang". Diunduh pada tanggal tgl. 1 Juni 2021.
- Sonata Lukman. 2009. "Tinjauan Yuridis Ketentuan Delik Suap Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia". Thesis. Program Pasca Sarjana. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Usman. 2011. "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana". Jurnal Ilmu Hukum Jambi. Universitas Jambi. Vol. 2. Nomor 1.

### **Artikel**

- Ahmad Lutfi Abdillah. *Suap-Menyuap dalam Pengadilan/Pejabat Negara.* [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), diakses pada 3 Mei 2021.
- Ali, "FIFA: Sepakbola Telah Disusupi Kejahatan Terorganisir. (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5270ce5840661/fifa--sepakbola-telah-disusupikejahatan-terorganisir>). Diakses pada tanggal 24 April 2021
- Kang Odon. *Apa itu pengaturan skor atau match fixing.* (<https://www.beritabola.win/apa-itu-pengaturan-skor-match-fixing/>). Diunduh pada Selasa 1 Juni 2021.

Luthfy Avian Ananda. *Match Fixing Dalam Sepak Bola Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana*. (www.kompasiana.com). diakses pada tanggal 22 April 2021

Saufa Ata Taqiyya. *Pasal untuk Menjerat Pelaku Suap di Sektor Swasta*. (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f086878a3f65/pasal-untuk-menjerat-pelaku-suap-di-sektor-swasta/>). Diakses pada tanggal 8 November 2021

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Fifa Code of Ethics 2018 dan Kode Disiplin Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia 2018 tentang Kode Etik dan Fair Play Sepakbola Indonesia

### **Putusan Mahkamah Agung**

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN/Bnr